

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

	Halama	an
DAFTAR	ISI	i
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	APBD	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II.	PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	5
	2.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	5 29
	2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	32 38
BAB III.	PENUTUP	41

LAMPIRAN Nota Kesepakatan Antara Pemerintah

Kabupaten Berau dengan DPRD Kabupaten

NOMOR 134/17.b/Mou-Hk3/VIII/2024

07/KSPKT/DPRD/2024

TANGGAL 9 Agustus 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dalam melaksanakan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa proses perencanaan dan penganggaran Pemerintahan Daerah menggunakan Pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan akan mempermudah Pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Komponennya meliputi antara lain: penyusunan RKPD, KU-APBD, PPAS, dan RKA-SKPD.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan semester kedua. Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh: pergeseran pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, adanya saldo anggaran yang terjadi akibat dari kelebihan dari tahun lalu serta adanya penambahan pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan PPAS APBD Tahun

Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya. Perubahan KU-APBD disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan:
- 5. Keadaan darurat: dan
- 6. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah:
- 2. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, dimana Perubahan PPAS ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD:
- 3. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunandaerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Sampai dengan awal semester II, penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun 2023 mengalami dinamika berdasarkan hasil evaluasi dalam perjalanan APBD, hal tersebut mendorong untuk mengkaji kembali kondisi asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran anta organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, antara lain adalah perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya yang mencakup perubahan laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, serta digunakannya Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Berikut akan dijelaskan beberapa perubahan yang terjadi pada aspek kerangka ekonomi regional, aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan, untuk menggambarkan adanya perubahan asumsi.

2.1.1. Perkembangan Kondisi Ekonomi Regional

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, diperlukan suatu indikator sebagai bahan acuan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menunjukkan adanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian. Perkembangan yang dimaksud ditunjukkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor permintaan maupun penawaran. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Dalam hal pembangunan daerah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah, maka penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut akan semakin baik.

Perekonomian suatu daerah dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di dalam suatu daerah dimana kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut terbagi dalam beberapa lapangan usaha dan sub lapangan usaha serta dapat menghasilkan input dan output dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya. Tentunya dengan harapan bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di derah yang tinggi, tentunya dapat mendorong terjadinya pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

2.1.1.1 Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Adapun ruang lingkup ekonomi global mencakup antara lain pertukaran barang, jasa dan sumber daya di antara negara-negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global.

Berdasarkan data yang tercatat pada International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook (Januari 2024), perekonomian global mengalami perlambatan pada tahun 2023 yaitu dengan pertumbuhan 3,1 persen dari yang sebelumnya sebesar 3,5 persen pada tahun 2022. Kemudian, aktivitas ekonomi global tetap terjaga sepanjang triwulan I tahun 2024. Inflasi yang mereda lebih cepat dari perkiraan,

meningkatnya kepercayaan swasta, berkurangnya ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, meningkatnya pendapatan riil, serta perdagangan yang tumbuh positif menunjukkan ketangguhan ekonomi global. Namun, perbaikan ekonomi berlangsung pada tingkat dan laju yang berbeda antar negara. Di wilayah Eropa dan sebagian besar negara berpendapatan rendah, perbaikan ekonomi relatif lebih lemah. Akan tetapi sebaliknya, pertumbuhan yang kuat terjadi di Amerika Serikat dan banyak negara berkembang. Di negara-negara berpendapatan rendah, inflasi masih cenderung lebih tinggi dari prakiraan. Pengaruh harga pangan, bahan bakar dan pupuk yang tinggi serta depresiasi mata uang memberikan tekanan harga yang cukup signifikan. Faktorfaktor tersebut juga menyebabkan perekonomian negara-negara tersebut tumbuh lebih lambat dari prakiraan, menunjukkan adanya guncangan pasokan yang negatif. Di sisi lain, di Tiongkok, inflasi turun secara tidak terduga dan mencerminkan penurunan tajam harga pangan dalam negeri dan dampak lanjutan terhadap inflasi inti.

Fenomena lain seperti risiko ekskalasi konflik geopolitik juga dapat menghambat ekspansi ekonomi seperti konflik di Timur Tengah dan Perang Ukraina-Rusia yang mana dapat berpotensi menimbulkan dampak material terhadap pasokan dan harga minyak. Kondisi ini juga bersamaan dengan inflasi inti yang terus menerus terjadi, pasar tenaga kerja yang masih ketat sehingga dapat meningkatkan ekspektasi suku bunga dan menurunkan harga aset. Perbedaan kecepatan dalam mengatasi masalah inflasi di antara negara-negara besar juga dapat menyebabkan pergerakan mata uang yang memberikan tekanan pada sektor keuangan. Ditambah lagi dengan kondisi di Tiongkok, jika tidak dilakukan tindakan respons komprehensif terhadap permasalahan sektor properti, pertumbuhan akan terhambat dan merugikan mitra dagang di berbagai negara. Selain itu, di banyak negara, potensi peningkatan pertumbuhan juga terhambat oleh memburuknya demografi dan lemahnya tren produktivitas.

20 15 10 Persen 5 0 Q1 Q3 Q3 Q4 Q2 O4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q1 2021 2022 2022 2022 2023 2024 AS Tiongkok Korsel Singapura Jepang

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Sumber: Tradingeconomics

Untuk beberapa negara besar seperti ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan dan Singapura pada triwulan I tahun 2024 (Y-on-Y) dapat tumbuh masing-masing sebesar 2,9 persen, 5,3 persen, 3,3 persen dan 2,7 persen sedangkan Jepang terkontraksi 0,2 persen. Capaian perekonomian Amerika Serikat didorong oleh peningkatan belanja konsumen, investasi tetap residensial dan non residensial, pengeluaran pemerintah pusat dan daerah dikurangi dengan pengurangan investasi swasta serta peningkatan impor. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah ini secara umum mencerminkan peningkatan kompensasi pegawai pemerintah daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi di Tiongkok yang mencapai angka 5,3 persen (Y-on-Y) ini telah melebihi ekspektasi (yang sebesar 5 persen), sehingga memberikan sedikit keringanan kepada Pemerintah Tiongkok untuk menopang pertumbuhan di tengah pelemahan yang berkepanjangan di sektor properti dan meningkatnya utang pemerintah daerah. Pertumbuhan yang kuat pada triwulan I tahun 2024 didukung oleh kinerja sektor manufaktur yang lebih baik, peningkatan belanja rumah tangga yang didorong oleh perayaan hari raya karena liburan Tahun Baru Imlek, dan adanya kebijakan yang membantu meningkatkan investasi. Pemerintah Tiongkok telah menetapkan serangkaian langkah kebijakan fiskal dan moneter seiring upaya Beijing untuk meningkatkan perekonomian.

Di Korea Selatan, pertumbuhan permintaan domestik menjadi faktor utama yang mendukung perekonomian dapat tumbuh sebesar 3,3 persen (Y-on-Y), dimana angka ini lebih kuat dari prakiraan analisis sebesar 2,5 persen. Melonjaknya permintaan produk teknologi seperti cip semikonduktor juga menjadi penyumbang terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada awal 2024. Dapat dikatakan bahwa ekspor menjadi faktor pendorong utama pemulihan perekonomian Korea Selatan bersamaan belanja domestik yang perlahan membaik. Akan tetapi, dengan melemahnya pasar tenaga kerja dan beban pembayaran utang yang kemungkinan akan tetap tinggi, pemulihan ekonomi Korea Selatan masih tetap menghadapi tantangan. Selanjutnya, perekonomian Singapura dapat terakselerasi sebesar 2,7 persen pada triwulan I tahun 2024. Angka triwulanan ini lebih tinggi dibandingkan pergerakan angka yang terjadi selama tahun 2023, walaupun masih berada di bawah proyeksi sebesar 3,0 persen. Peningkatan angka pertumbuhan ini didorong oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 4,1 persen dan perdagangan besar tumbuh sebesar 1,5 persen karena dorongan oleh segmen bahan bakar dan kimia. Selain itu, perdagangan eceran juga meningkat 2,7 persen yang didukung oleh menguatnya volume penjualan kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Jika empat negara sebelumnya mengalami pertumbuhan yang positif, hal sebaliknya terjadi di perekonomian Jepang yang melemah pada triwulan I tahun 2024 dengan kontraksi sebesar 0,2 persen (Y-on-Y). Ekonomi Jepang tertekan oleh melemahnya konsumsi dan permintaan eksternal serta adanya tantangan baru bagi para pengambil kebijakan, karena bank sentral berupaya untuk mengangkat suku bunga acuannya dari tingkat mendekati nol dan berdampak pada melemahnya nilai Yen. Melemahnya mata uang Yen telah menciptakan two speed economy di Jepang, dimana sektor ekspor dan pariwisata secara luas mendapatkan keuntungan dari nilai tukar yang lebih kompetitif, sementara rumah tangga dan usaha kecil terbebani oleh kenaikan harga barang impor sehingga memperumit Bank Sentral Jepang untuk menentukan apakah harus mempertahankan stimulus moneternya atau terus menguranginya. Penurunan Yen masih menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi Jepang, begitu pula lonjakan harga minyak mentah akibat krisi Timur Tengah.

Selain itu, keputusan *The Fed* pada rangkaian pertemuan ke-5 yang dilaksanakan pada Maret 2024 adalah mempertahankan suku bunga tetap pada kisaran 5,25-5,50 persen. Hal ini ternyata sesuai dengan ekspektasi pasar, namun juga memberikan isyarat bahwa akan ada tiga kali penurunan suku bunga sebelum akhir tahun 2024 ini. The Fed menambahkan bahwa mereka akan mulai mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga apabila inflasi turun menuju 2 persen. Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara yang berada di Kawasan Eropa. Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan suku bunganya pada tingkat tertinggi pada pertemuan bulan Maret 2024 yaitu sebesar 4,5 persen karena para pengambil kebijakan ingin meredam kekhawatiran terkait kemungkinan resesi yang akan terjadi karena tekanan inflasi yang terus meningkat. Tidak jauh berbeda, Bank Sentral Korea Selatan (BoK) memutuskan mempertahankan suku bunganya untuk kesembilan kalinya yaitu sebesar 3,5 persen pada rangkaian pertemuan bulan Februari 2024. Negara-negara yang bergabung pada BRICS juga mempertahankan suku bunga mereka, kecuali Brasil yang menurunkan suku bunganya. Bank sentral Brasil menurunkan suku bunga Selic sebesar 50 bps menjadi 10,75 persen pada pertemuan bulan Maret, sesuai dengan ekspektasi selama ini. Keputusan ini diambil setelah Brazil mengamati kondisi eksternal yang masih bergejolak, yang ditandai dengan perdebatan seputar inisiasi pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara besar dan laju penurunan inflasi secara global.

Selanjutnya dari sisi volatilitas harga komoditas global, rata-rata harga minyak mentah secara triwulanan tercatat sebesar USD 80,6 per barel pada triwulan I 2024, naik 2,0 persen dibandingkan dengan harga rata-rata triwulanan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis minyak mentah, harga minyak mentah Dubai, WTI dan Brent masing-masing menguat sebesar 2,5 persen, 1,2 persen dan 2,1 persen (Yon-Y). Peningkatan harga minyak dunia selain disebabkan oleh meningkatnya permintaan, juga disebabkan adanya kekhawatiran terjadinya gangguan supply di tengah berlanjutnya risiko geopolitik di Timur Tengah picu kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak, khususnya apabila terdapat hambatan jalur minyak di Selat Hormuz. Faktor lainnya yaitu serangan Ukraina terhadap kilang-kilang minyak Rusia yang berpotensi pengetatan pasokan di pasar minyak. Selain itu, persediaan minyak mentah yang menurun akibat penutupan sumur-sumur minyak karena cuaca buruk dan kesepakatan penurunan produksi minyak oleh OPEC juga menjadi faktor pendorong harga minyak mentah. Adapun untuk di kawasan Asia Pasifik, kenaikan harga minyak mentah turut disebabkan oleh peningkatan throughput kilang minyak di Tiongkok, India dan Singapura serta adanya peningkatan produksi dan profit sektor industri di Tiongkok yang mengindikasikan pemulihan perekonomian Tiongkok sebagai salah satu konsumen energi terbesar.

120 90 JSD/Barel 60 30 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 Dubai WTI -Brent

Gambar 2. Perkembangan Harga Minyak Mentah

Sumber: World Bank

Berbeda dengan harga minyak mentah yang masih mengalami kenaikan, rata-rata triwulanan harga batu bara pada triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar USD 126,9 per MT. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 46,6 persen dibandingkan triwulanan yang sama pada tahun 2023. Turunnya harga batu bara terutama disebabkan oleh turunnya permintaan dari Eropa yang diperkirakan akan meninggalkan batu bara pada tahun 2024. Ancaman resesi serta kenaikan produksi listrik dari energi baru terbarukan akan membuat penggunaan energi dari fosil ini akan kembali tersingkir dan ditinggalkan di wilayah ini. Meskipun demikian, penggunaan batu bara global masih dapat meningkat karena tingginya pemanfaatan batu bara di Tiongkok. Seperti diketahui, Tiongkok menjadi negara yang menyumbang hampir 60 persen penggunaan batu bara di seluruh dunia untuk pembangkit listrik. Dengan semakin banyak penggunaan batu bara di Tiongkok, maka semakin banyak pula penggunaan batu bara sebagai bahan bakar listrik di dunia secara global. Namun, pemerintah Tiongkok juga berusaha meningkatkan produksi batu bara dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya stok batu bara dalam negeri Tiongkok itu sendiri. Hal ini tentunya akan turut berperan terhadap pergerakan harga batu bara di dunia.

450 9 360 6 270 180 3 90 Q3 Q3 Q1 Q2 Q4 Q1 2021 2021 2024 Gas Alam, AS Batu Bara, Australia

Gambar 3. Perkembangan Harga Gas Alam dan Batu Bara

Sumber: World Bank

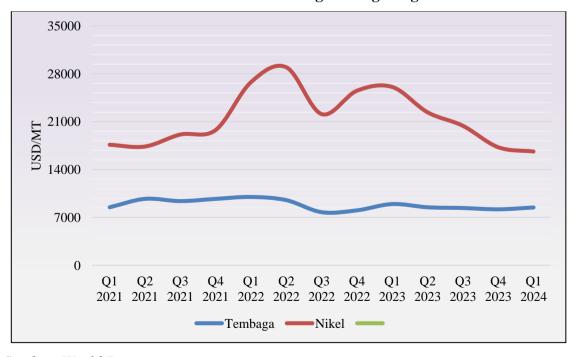
Adapun untuk harga gas alam, terjadi penurunan 19,6 persen untuk harga rata-rata triwulanan dari 2,7 USD per mmbtu pada triwulan I tahun 2023 menjadi USD 2,1 per mmbtu pada triwulan I tahun 2024. Penurunan harga gas alam ini dipengaruhi oleh musim dingin yang lebih ramah dan faktor kelebihan produksi (*over supply*). Faktor lainnya adalah fenomena El Nino yang melemahkan angin pasat dan mendorong air hangat menuju pantai barat, sehingga mengakibatkan kondisi cuaca hangat yang mengurangi kebutuhan gas alam untuk pemanasan.

Selanjutnya, pada komoditas pertanian, terjadi pergerakan harga yang bervariasi Rata-rata harga minyak kelapa sawit pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 881,6 per ton atau menurun sebesar 7,7 persen dibandingkan dengan rata-rata harga periode yang sama pada tahun 2023 yang sebesar USD 954,7 per ton. Harga minyak kelapa sawit yang relatif menurun merupakan dampak dari persediaan yang cukup kuat dari negara-negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia. Meskipun demikian, tren bulanan harga minyak kelapa sawit pada triwulan I tahun 2024 cenderung naik yang disebabkan oleh peningkatan harga minyak mentah dunia dan peningkatan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai akibat munculnya kekhawatiran penurunan pasokan dadi Brazil karena pengaruh cuaca yang kering. Hal ini tentunya akan memicu pengalihan pilihan dari minyak nabati ke minyak kelapa sawit. Adapun faktor penyebab lainnya adalah kekhawatiran pengetatan pasokan minyak kelapa sawit dari Malaysia dan pelemahan mata uang Ringgit Malaysia terhadap Dolar Amerika Serikat.

Pada komoditas logam dasar, harga rata-rata triwulanan tembaga pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 8.444,3 per MT. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar USD 8.943,6 per MT, kondisi triwulan I tahun 2024 ini turun 5,6 persen. Harga tembaga melemah karena ketidakpastian penurunan suku bunga dan pemulihan ekonomi yang tidak merata di Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok meleset dari perkiraan pertumbuhan ekonomi sementara penjualan di sektor properti yang banyak berhutang terus

menurun. Turunnya harga tembaga juga disebabkan oleh permintaan yang cenderung melemah secara global. Kelebihan kapasitas dan ekspansi yang terus berlanjut pada industri *smelter* di Tiongkok telah menyebabkan penurunan tajam biaya pengolahan tembaga. Sementara itu, persediaan tembaga terus meningkat yang memberikan tekanan tambahan pada harga tembaga. Produksi tembaga olahan dari Tiongkok naik ke level tertinggi pada akhir tahun 2023 setelah negara tersebut memperluas kapasitas peleburan dan pemurniannya. Pergeseran ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan strategis Tiongkok akan tembaga seiring dengan meningkatnya permintaan tembaga dari sektor energi ramah lingkungan.

Pada komoditas logam dasar, harga rata-rata triwulanan tembaga pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 8.444,3 per MT. Jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada triwulan I tahun 2023 yang sebesar USD 8.943,6 per MT, kondisi triwulan I tahun 2024 ini turun 5,6 persen. Harga tembaga melemah karena ketidakpastian penurunan suku bunga dan pemulihan ekonomi yang tidak merata di Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok meleset dari perkiraan pertumbuhan ekonomi sementara penjualan di sektor properti yang banyak berhutang terus menurun. Turunnya harga tembaga juga disebabkan oleh permintaan yang cenderung melemah secara global. Kelebihan kapasitas dan ekspansi yang terus berlanjut pada industri *smelter* di Tiongkok telah menyebabkan penurunan tajam biaya pengolahan tembaga. Sementara itu, persediaan tembaga terus meningkat yang memberikan tekanan tambahan pada harga tembaga. Produksi tembaga olahan dari Tiongkok naik ke level tertinggi pada akhir tahun 2023 setelah negara tersebut memperluas kapasitas peleburan dan pemurniannya. Pergeseran ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan strategis Tiongkok akan tembaga seiring dengan meningkatnya permintaan tembaga dari sektor energi ramah lingkungan.



Gambar 4. Perkembangan Harga Logam Dasar

Sumber: World Ban

Jika sebelumnya harga rata-rata tembaga hanya sedikit mengalami penurunan, untuk komoditas nikel mengalami penurunan harga yang signifikan yaitu mencapai 36,2 persen (*Y-on-*

Y). Penurunan ini terjadi pada harga nikel yang sebelumnya mencapai USD 26.070,4 per MT pada triwulan I tahun 2023 menjadi senilai USD 16.627,0 per MT pada triwulan I tahun 2024. Harga nikel dunia jatuh dan bahkan harga pada triwulan I 2024 ini merupakan yang terendah selama tiga tahun terakhir. Pelemahan terjadi ditengah isu berlebihnya pasokan nikel global yang berasal dari Indonesia. Produksi nikel dari Indonesia, yang sudah menyumbang setengah dari pasokan global, diperkirakan akan lebih resistan terhadap pengurangan produksi. Indonesia telah menjadi pusat nikel global setelah melakukan investasi miliaran Dolar pada pabrik-pabrik efisien yang memanfaatkan tenaga kerja murah, listrik murah, dan bahan mentah yang mudah didapat. Selain itu, lemahnya harga nikel diklaim turut dipengaruhi oleh lithium ferrophosphate (LFP) sebagai alternatif bahan baku kendaraan listrik. LFP sendiri saat ini tengah hangat diperbincangkan sebagai komponen yang lebih murah dan mudah dibanding nikel.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat memberikan penjelasan bahwa dinamika perekonomian global saat ini masih terus dihadapkan kepada berbagai risiko yang menyangkut ketidakpastian situasi geopolitik, perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, hingga perlambatan kondisi perekonomian sejumlah negara maju. Adapun diantara negara maju, yang saat ini mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yakni Jepang dan Inggris, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan melemahnya permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam dua kuartal berturut-turut memberikan sinyal bahwa Jepang dan Inggris akan masuk ke dalam resesi secara teknikal. Meskipun demikian, masih terlalu dini untuk menilai bahwa kedua negara tersebut akan memasuki kondisi resesi ekonomi. Menurut National Bureau of Economic Research (NBER), resesi sendiri secara luas dapat diartikan sebagai penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan, dan biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, serta penjualan grosir eceran.

Pemerintah perlu terus untuk melakukan monitoring dampak transmisi perlambatan ekonomi global, terutama Jepang terhadap perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena Indonesia dan Jepang memiliki hubungan kerja sama yang baik, misalnya pada aspek investasi dan ekspor impor. Seperti diketahui, Jepang merupakan salah satu tujuan utama ekspor bagi Indonesia dengan komoditas utama berupa ekspor batu bara, nikel, komponen elektronik dan otomotif. Tercatat ekspor Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2023 berada pada urutan ke-4 dengan total mencapai USD 18,8 miliar. Di sisi lain, investasi dari Jepang ke Indonesia melalui Foreign Direct Investment pada tahun 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total investasi sebesar USD 4.63 miliar.

Selain itu, dalam rangka menjaga ketahanan sektor eksternal yakni neraca perdagangan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Satgas tersebut akan berupaya meningkatkan kinerja ekspor

nasional guna memperkuat neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baik melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional serta pengembangan ekspor UMKM. Selain itu, upaya penjajakan dalam rangka membuka pasar baru untuk pengembangan ekspor juga terus dilakukan oleh Pemerintah.

2.1.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Dalam menyajikan potret perekonomian nasional, Indonesia menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara selama kurun waktu tertentu. PDB dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, produksi, pendapatan dan pengeluaran. PDB Indonesia dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi yang biasa disebut PDB menurut lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran yang biasa disebut PDB menurut pengeluaran. PDB lapangan usaha menjelaskan barang/jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi pada suatu negara pada kurun waktu tertentu, sedangkan PDB pengeluaran menjelaskan penggunaan barang/jasa penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori, dan ekspor serta impor.

Terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, negara Indonesia terhubung dengan kondisi global termasuk pada bidang perekonomian. Tahun 2023 menjadi salah satu tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Setelah berupaya pulih sepenuhnya pasca pandemi COVID-19, segala disrupsi ekonomi global seperti inflasi, rantai stok, geopolitik, dan perubahan iklim menjadi tantangan. Dalam menjawab tantangan yang tersedia, stakeholder (pemerintah) mencanangkan kerangka Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebanyak 41 proyek prioritas mayor strategis berisi penguatan sektor prioritas, peningkatan destinasi wisata prioritas, peningkatan kawasan industri, penguatan jaminan usaha, dan lain sebagainya. Atas perencanaan RPJMN yang sudah direalisasikan, mengacu pada hasil perhitungan PDB Indonesia tahun 2023 tumbuh positif dengan pertumbuhan 5,05 persen dengan nilai PDB riil (PDB ADHK) sebesar 12.301,40 triliun rupiah dan PDB nominal (PDB ADHB) sebesar 20.892,40 triliun rupiah. Pertumbuhan PDB tahun 2023 memang cenderung lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 yakni sebesar 5,31 persen. Perlambatan sebesar 0,26 persen ini tidak menunjukkan hal yang buruk. Sebab, pada tahun 2023 kinerja pertumbuhan ekonomi pada tiap kategori lapangan usaha masih tumbuh positif. Perlambatan ini juga diindikasikan terjadi sebagai dampak atas adanya perlambatan ekonomi global.

Apabila dikaji menurut peranan 38 provinsi yang ada, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur dengan peranan dua terbesar nasional yakni sebesar 16,77 persen dan 14,38 persen secara berturut-turut. Sementara itu dengan cakupan pengelompokan yang lebih besar yakni lingkup pulau, PDB nasional masih didukung secara dominan oleh pulau jawa dengan distribusi PDB sebesar 57,05 persen. Apabila ditarik seri data ke belakang sepanjang lima tahun, distribusi/peranan pulau jawa terhadap PDB cukup stabil pada rentang peran 56 hingga 58 persen. Peranan yang dominan ini mengindikasikan pusat perekonomian yang nyatanya memang masih bertumpu pada sektor-sektor industri dan pertanian yang ada di pulau jawa. Guna mengurai dependensi perekonomian terhadap pulau jawa, pemerintah mengupayakan berbagai proyek prioritas dalam RPJMN 2020-2024 pada wilayah di luar jawa 5 diantaranya meliputi:

- 1. Proyek 9 kawasan industri di luar jawa dan 31 *smelter* sebagai upaya mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa:
- 2. Pembangunan wilayah Batam-Bintan sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Foreign Direct Investment (FDI) nasional, dan angka serapan tenaga kerja;
- 3. Pengembangan wilayah metropolitasn Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar sebagai upaya meningkatkan share PDRB wilayah metropolitan luar jawa terhadap nasional dan meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB);
- 4. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sebagai upaya memberikan akses yang lebih merata;
- 5. Pengembangan jalan tol trans Sumatera Aceh-Lampung sebagai upaya menjadikan enabler bagi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil di tahun 2023, didukung oleh pertumbuhan yang terus menerus tumbuh positif pada tiap triwulannya. Terbagi ke dalam empat triwulan, PDB Indonesia tumbuh pesat pada triwulanan dua tahun 2023 dengan pertumbuhan tahun ke tahun (y-o-y) sebesar 5,17 persen. Mengkaji dari fenomena yang ada, pertumbuhan PDB tahun 2023 disumbang oleh pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,98 persen. Di sisi lain, justru lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki laju pertumbuhan impresif dengan pertumbuhan secara berurutan 13,96 persen, 10,52 persen, dan 10,01 persen. Faktor pendorong pertumbuhan pada ketiga lapangan usaha jasa ini adalah adanya peningkatan mobilitas masyarakat dan peningkatan volume pengiriman barang. Berdasarkan distribusi/peranan PDB lapangan usaha terhadap total PDB didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan 18,67 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan 12,94 persen, dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 12,53 persen. Lapangan usaha industri pengolahan masih menjadi lapangan usaha dominan dengan dukungan subkategori industri pengolahan non migas dengan peranan secara total 16,75 persen dan masih didominasi oleh industri makanan dan minuman.

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2023, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,82 persen, lebih lambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 4,94 persen. Namun komponen pengeluaran ini masih berkontribusi besar sebagai sumber pertumbuhan sebesar 2,55 persen. Bahkan secara total peranan pengeluaran akhir rumah tangga di Indonesia terhadap total PDB meencapai 53,18 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada komponen pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, setelah sempat kontraksi pada tahun 2022 dengan 4,47 persen, tahun 2023 komponen ini tumbuh poosiitif dengan 2,95 persen. Kontradiktif dengan PKP, perkembangan impor di Indonesia justru menunjukkan penurunan. Sempat tumbuh 15 persen pada tahun 2022, tahun 2023 komponen pengeluaran ini justru berkontraksi 1,65 persen. Kendati tidak mengalami kontraksi sebesar tahun 2019 dan 2020 yang secara berurutan berkontraksi 7,13 persen dan 17,60 persen penurunan ini setidaknya menjadi hasil atas kebijakan impor untuk menurunkan ketegantungan Indonesia terhadap pasar asing. Salah satu kebijakan perencanaaan yang berhubungan dengan adanya upaya penurunan dependensi impor yakni pembangunan 9 kawasan industri di luar jawa dan 31 smelter sebagai upaya penurunan 71 persen impor Indonesia yang merupakan bahan baku adn produk antara untuk industri. Selain itu telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.04/2022 berlaku efektif 10 Januari 2023 terkait pemeriksaan pabean di bidang impor yang berisi prosedur penyiapan barang dengan mekanisme baru yang lebih terstruktur selain itu penggantian PMK ini bertujuan untuk semakin meningkatkan kelancaran arus barang serta mempercepat pelaksanaan pemeriksaan pabean di bidang impor. Dalam kajian makroekonomi, impor merupakan unsur pengurang oleh karena itu penurunan impor turut meningkatkan nilai tambah Indonesia (PDB).

Pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, kegiatan pemerintah baik berupa belanja barang/jasa dan belanja pegawai menunjukkan peningkatan. Komponen pengeluaran ini secara dominan berasal dari komponen belanja pegawai. Di sisi lain ada pula pengeluaran pemerintah yang tidak dikelompokkan pada kelompok pengeluaran pemerintah yakni pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembentukan barang modal seperti, jalan, irigasi, bangunan, dsb dikelompokkan pada kelompok pengeluaran pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pada tahun 2023, pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB cukup impresif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yakni sebesar 9,83 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh dukungan sisi pembangunan konstruksi yang sedang dilakukan besar-besaran pada beberapa titik di Indonesia, terutama pada pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Proyek IKN ini berlangsung pada tahun 2020 dan diharapkan selesai pada tahun 2024. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, progres IKN pada tahun 2023 meliputi pembangunan rumah dinas dan sarana

kesehatan, pembangunan jaringan dan jalan makro, bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik. Mengutip laporan otorita IKN melalui laman resminya, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 realisasi investasi IKN mencapai 41,4 triliun rupiah.

Pencatatan PDB dalam cakupan makroekonomi juga menyajikan PDB nominal atau yang lebih dikenal PDB atas dasar harga berlaku (ADHB). Perhitungan BPS RI menyajikan PDB nominal sebesar 20.892 triliun rupiah pada tahun 2023. Selisih antara PDB riil dan nominal menunjukkan beberapa kelompok pengeluaran dengan sumbangsi terbesar berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi (yto-y) sebesar 6,18 persen.

Nilai tambah yang ada pada suatu negara hendaknya dinikmati/terdistribusi secara adil pada seluruh masyarakat. Salah satu indikator turunan yang dapat menyajikan fenomena ini yakni PDB perkapita. Indikator turunan ini dihitung melalui pembagian nilai PDB nominal dengan jumlah penduduk pada suatu negara. Tiap tahun, jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dengan tetap terkendali. Berdasarkan jumlah penduduk tengah tahun yang dirilis BPS pada tengah tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa atau meningkat sebesar 1,21 persen dibanding tahun 2022 dengan jumlah penduduk 275,36 juta jiwa. Jumlah penduduk yang semakin meningkat selaras dengan nilai tambah yang juga semakin besar di tahun 2023. Dalam mengkaji besaran nilai yang seharusnya dinikmati tiap kapita penduduk, pada tahun 2019-2023 PDB perkapita Indonesia menunjukkan peningkatan, sejalan dengan perbandingan kenaikan PDB dan jumlah penduduk, kecuali tahun 2020 PDB per kapita mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai PDB akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan menjadi 74.964,7 ribu rupiah seiring dengan meningkatnya nilai PDB dan pemulihan ekonomi. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDB atau nilai tambah sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun. Pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan nilai PDRB perkapita sebesar 5,52 persen. Pertumbuhan PDB perkapita ini diharapkan menjadi potret peningkatan kesejahteraan dari sisi ekonomi pada penduduk Indonesia secara umum.

2.1.1.3 Kondisi Perekonomian Daerah

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan kemitraan dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, dan penting bagi mereka untuk mengoptimalkan potensi tersebut guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Meskipun aktivitas ekonomi tersebut bisa dimiliki oleh non residen, dampaknya tetap akan dirasakan oleh masyarakat setempat karena adanya multiflyer effect yang ditimbulkan dari suatu kegiatan perekonomian yang dimiliki oleh non residen tersebut, dimana dapat dirasakan dan memberikan keuntungan secara ekonomi terhadap masyarakat setempat. Angka PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

PDRB yang dihitung oleh BPS disajikan menurut dua pendekatan harga yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan keduanya terletak pada harga yang digunakan dalam proses penghitungan angka PDRB. Jika PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun dasar yakni harga pada tahun 2010, maka PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan. Hal ini yang menyebabkan kondisi umum yang terjadi dimana nilai PDRB atas dasar harga berlaku cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dari PDRB atas dasar konstan. Seperti diketahui, hampir seluruh komoditas dalam perekonomian selalu mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu (fenomena inflasi). Oleh karena itu, harga komoditas pada tahun bersangkutan akan cenderung bernilai lebih tinggi dibandingkan harga pada tahun dasar. Kemudian, ketika dilakukan penghitungan akan menghasilkan nilai PDRB atas dasar berlaku yang lebih besar dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini sesuai dengan teori dan metode penghitungannya dimana dalam PDRB atas dasar harga konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Ukuran selanjutnya yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi ialah inflasi. Dalam konteks awalnya, inflasi diartikan sebagai pertambahan jumlah uang yang beredar atau likuiditas yang terjadi dalam suatu sistem ekonomi. Definisi ini menunjuk pada fenomena umum yang muncul akibat meningkatnya jumlah uang yang berputar dan diduga sebagai penyebab dari kenaikan harga-harga. Secara progresif, inflasi kemudian didefinisikan sebagai peningkatan umum dalam harga-harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara berkesinambungan (Supriyanto, 2007:171). Jika mengacu pada arti secara umum, inflasi adalah suatu ukuran yang mengindikasikan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta merupakan hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran dalam pasar riil. Faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar mata uang,

indeks anggaran, dan parameter ekonomi makro lainnya turut berperan dalam perubahan inflasi. Inflasi sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar (demand pull inflation), faktor biaya produksi yang meningkat (cosh push inflation) atau karena pengaruh kenaikan harga pada barang-barang impor.

Berdasarkan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Desember 2023, inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 0,39 persen (terhadap November 2023), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan yang sama pada tahun 2022 yakni Desember 2022 terhadap November 2022 yang sebesar 0,23 persen. Namun, secara umum tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2023) dan tingkat inflasi year on year (tahun ke tahun atau Desember 2023 terhadap Desember 2022) tercatat lebih rendah yakni sebesar 3,46 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,35 persen. Inflasi pada tahun 2023 menunjukkan trend yang meningkat walaupun terjadi perlambatan jika dibanding tahun 2022. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah untuk menekan kenaikan harga pangan melalui operasi pasar serta adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat. Menurut Sarbaini dan Nazaruddin (2023), menjaga inflasi tetap rendah dan stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh stabilitas inflasi yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka (Simanungkalit, 2020). Kenaikan harga yang disebabkan oleh inflasi memotivasi pengusaha untuk meningkatkan produksi karena potensi keuntungan yang lebih besar (Simanungkalit, 2020). Peningkatan produksi ini akan meningkatkan nilai produk domestik regional bruto (PDRB), yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika inflasi terlalu tinggi, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian suatu wilayah. Kenaikan harga yang berlebihan menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti periode waktu sebelumnya (Fadilla & Purnamasari, 2021). Akibatnya, ketidakstabilan ekonomi terjadi, yang berujung pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Wiriani & Mukarramah, 2020). Inflasi yang terlalu rendah dan tidak stabil juga berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi (Suriyani & Sudiartha, 2018). Kenaikan harga yang terlalu rendah dan tidak stabil mengurangi dorongan bagi pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka. Sehingga, dampaknya adalah penurunan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, karena komoditas yang dihasilkan dapat dikonsumsi oleh wilayah lain atau bahkan diekspor ke luar negeri. Misalnya Provinsi Kalimantan Timur yang telah dikenal oleh kalangan masyarakat umum sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari total PDRB yang dihasilkan dari kegiatan

pertambangan batu bara di Indonesia, besarnya sumbangsih dari kegiatan pertambangan batu bara Provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 25,83 persen. Selain itu, berbagai catatan peristiwa lainnya dalam perekonomian global seperti permintaan batu bara berenergi rendah dari Indonesia ke China dan India mengalami peningkatan, serta meningkatnya ketersediaan batu bara Afrika Selatan di Asia telah membantu menahan laju kenaikan harga batubara Indonesia dan Australia. Sebagaimana teori ekonomi, ketika terjadi ketidakseimbangan permintaan dan penawaran maka akan menyebabkan kenaikan harga. Kondisi tersebut menjadi suatu keuntungan bagi peningkatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang komoditas utamanya merupakan produk ekspor yang sangat bergantung pada kondisi perekonomian global.

Dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur sendiri, kontribusi ekonomi dari kegiatan pertambangan batu bara masih sangat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih berbasis sumber daya alam yang suatu saat akan habis karena sifatnya tidak dapat diperbaharui. Kondisi ini tentunya berbeda dengan perekonomian di wilayah Pulau Jawa yang didominasi oleh hasil produk industri pengolahan. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, dari total PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 843.571.252,08 juta rupiah, sebanyak 43,19 persen merupakan sumbangsih dari lapangan usaha pertambangan batu bara. Kondisi demikian sudah lama terjadi sejak berkembangnya kegiatan pertambangan batu bara dimana produk yang dihasilkan dapat menjadi sumber energi pada berbagai kegiatan ekonomi. Tidak hanya kekayaan alam berupa batu bara, Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki nilai tambah ekonomi cukup besar dari kegiatan yang berbasis sumber daya alam lain yakni dari industri pengilangan minyak dan gas yang tercakup dalam kategori industri pengolahan. Pada tahun 2023, kontribusi dari industri pengolahan ini mencapai 17,73 persen.

Dari sisi perkembangan produksinya, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dapat tumbuh sebesar 6,22 persen pada tahun 2023. Angka PDRB tahun 2023 atas dasar harga konstan yang mencapai sebesar 537.630.006,81 juta rupiah. Angka ini meningkat akibat dari berbagai macam peristiwa, seperti aktivitas konstruksi yang terus berlangsung terutama progress fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta proyek konstruksi kilang RDMP Balikpapan, penyelenggaraan event nasional dan internasional serta aktivitas keagamaan juga sudah dalam kondisi normal. Selain itu, mobilitas manusia dan barang yang sudah tidak dibatasi dan tersedianya berbagai macam rute penerbangan menyebabkan perputaran arus uang dan barang menjadi lebih lancar sehingga perekonomian menjadi lebih hidup. Jika dibandingkan angka pertumbuhan nasional, angka pertumbuhan Provinsi Kalimantan Timur ini lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05 persen. Pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang merupakan aktivitas ekonomi pencipta nilai tambah

terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, dapat tumbuh sebesar 5,18 persen pada tahun 2023. Adapun pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang bahkan mencapai 16,05 persen. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan jumlah listrik yang diproduksi dan didistribusikan di kabupaten/kota seKalimantan Timur dan peningkatan layanan listik 24 jam di beberapa desa selama tahun 2023. Selain itu, terjadi peningkatan penyaluran gas kota di beberapa kabupaten/kota selama 2023 berdasarkan data PGN dan PT Pertagas Niaga. Pertumbuhan yang cukup besar juga di Provinsi Kalimantan Timur, terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang dapat tumbuh mencapai 15,82 persen pada tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur dimana pembangunan berbagai infrastruktur pendukung IKN tentunya banyak dilakukan di wilayah ini.

Kabupaten Berau merupakan bagian administrasi dari Provinsi dari Kalimantan Timur yang terletak di bagian paling utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun secara geografi berada paling jauh dibanding kabupaten/kota lainnya, potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Berau masih serupa dengan kabupaten/kota lainnya yaitu kegiatan ekonomi berbasis kekayaan alam. Berdasarkan data BPS Kabupaten Berau, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 51.280.017,17 juta rupiah pada tahun 2023 dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 31.570.052,94 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar 8.878.139,88 juta rupiah dan angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar 1.629.217,43 juta rupiah. Perbedaan yang cukup jauh bahkan berbeda arah antara kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku memasukkan harga sesuai pada tahun yang bersangkutan. Penurunan harga yang sangat signifikan terutama disebabkan oleh komoditas produk utama di Kabupaten Berau seperti rata-rata harga ekspor batu bara di Indonesia yang mengalami penurunan dari Rp 1.834.329 per MT pada tahun 2022 menjadi Rp 1.287.949 per MT pada tahun 2023 (menurun sebesar 29,79 persen) dan rata-rata harga tetapan CPO Provinsi Kalimantan Timur yang menurun sebesar 13,97 persen.

Secara komposisi, pemilik peran terbesar dari perekonomian Kabupaten juga adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Jika di Provinsi Kalimantan Timur, lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 43,19 persen, untuk di Kabupaten Berau, kontribusi yang dapat diberikan oleh lapangan usaha ini mencapai 58,27 persen. Dengan peran yang sangat besar ini, maka terjadinya gejolak yang terjadi pada lapangan usaha ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 2020 dimana lapangan usaha ini tumbuh negatif, perekonomian Kabupaten Berau juga mengalami kontraksi sebesar 3,32 persen. Begitu besarnya peran kegiatan pertambangan

batu bara dalam perekonomian Kabupaten Berau, Gambar 5 dapat menunjukkan bahwa nilai nominal PDRB Kabupaten Berau tanpa batu bara hanya sebesar 25.818,86 miliar rupiah, lebih dari setengah PDRB Kabupaten Berau yang mencapai 51.280,02 miliar rupiah. Terdapat selisih sebesar 25.461,16 juta rupiah antara total PDRB dengan PDRB tanpa batu bara atau nilai tersebut menunjukkan besarnya PDRB dari kegiatan pertambangan batu bara.

60.158,16 51.280,02 43.036,48 39.104,69 35.450,85 25.818,86 23,916,30 21.135,77 19,051,50 18.819,10 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL PDRB PDRB TANPA BATU BARA

Gambar 5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah), 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Struktur perekonomian Kabupaten Berau tidak begitu banyak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Lapangan usaha yang memiliki peran paling dominan atau memiliki kontribusi terbesar adalah pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha tersebut selalu memiliki kontribusi di atas 50 persen atau dengan kata lain dibandingkan dengan 16 lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini masih menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Kabupaten Berau. Dalam lingkup pemerintahan, dengan dominasi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian ini, juga memberikan pengaruh cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Hal ini diakibatkan salah satu sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu "bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi royalti". Selain itu, penduduk di Kabupaten Berau juga sangat menggantungkan pendapatan dari bekerja pada lapangan usaha ini. Meskipun masih lebih sedikit penduduk yang bekerja pada lapangan usaha ini, tetapi pendapatan yang terima dari bekerja pada lapangan usaha ini masih lebih besar dibandingkan bekerja pada lapangan usaha lainnya.

Lapangan usaha yang memiliki peran terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Berau adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Seperti hal nya lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha ini juga berbasis sumber daya alam dimana sangat bergantung pada kondisi alam serta ketersediaan lahan. Terutama dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Kondisi ini sesuai dengan pertanian di Kabupaten Berau dimana kegiatan pertanian terbesar adalah perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Dinas Perkebunan, luas tanaman perkebunan kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari peluang pasar, perkebunan kelapa sawit memang menjadi pilihan yang sangat menarik bagi masyarakat karena memiliki prospek yang menjanjikan serta kemudahan pemasaran. Selain itu, ditambah lagi kekayaan alam berupa hutan produksi kayu dan hasil laut juga turut menyumbang perkembangan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Adapun dalam pembentukan PDRB Kabupaten Berau tahun 2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 11,26 persen. Secara angka peranan, kondisi tahun 2023 ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang di bawah 10 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga masih menjadi tumpuan utama kegiatan ekonomi penduduk dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 27,04 persen penduduk Kabupaten Berau bekerja pada lapangan usaha ini.

Tabel 2.1 Distribusi PDRB Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,68	11,71	11,73	9,33	11,2
В	Pertambangan dan Penggalian	60,81	56,28	59,68	66,98	58,2
С	Industri Pengolahan	4,07	4,78	4,32	3,49	4,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,03	0,0
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,0
F	Konstruksi	4,06	4,16	3,74	3,36	4,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	6,53	5,72	4,99	6,4
Н	Transportasi dan Pergudangan	5,78	6,14	5,41	4,47	5,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,25	1,04	0,81	1,0
J	Informasi dan Komunikasi	0,91	1,08	0,95	0,72	0,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,53	0,60	0,50	0,41	0,5
L	Real Estate	0,89	0,99	0,83	0,62	0,7
M,N	Jasa Perusahaan	0,10	0,11	0,09	0,07	0,0
О	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,22	1,03	0,80	1,0
P	Jasa Pendidikan	2,50	3,03	2,77	2,22	2,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,91	1,25	1,37	1,10	1,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,70	0,79	0,71	0,57	0,7
	Kabupaten Berau	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki urutan peran terbesar ketiga dalam perekonomian Kabupaten Berau adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu dengan kontribusi sebesar 6,48 persen pada tahun 2023. Untuk kegiatan non pertanian, kegiatan perdagangan ini merupakan usaha yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Kabupaten Berau karena termasuk kegiatan ekonomi yang relatif mudah untuk dilakukan tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Kegiatan perdagangan merupakan penghubung antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan kegiatan ekonomi. Selanjutnya pada urutan keempat terdapat lapangan usaha

^{*}Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

transportasi dan pergudangan dengan kontribusi 5,91 persen.

Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Berau atas dasar harga konstan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai gejolak perekonomian dunia sebagaimana yang terjadi pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2023 ialah sebesar 5,44 persen, mengalami percepatan dibandingkan tahun 2022 yang dapat tumbuh sebesar 3,95 persen. Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Berau dapat tumbuh rata-rata sebesar 3,41 persen setiap tahunnya. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Berau, terus mengalami perbaikan kinerja ekonomi pada tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Gambar 6 juga menunjukkan bahwa suatu gejolak atau fenomena yang terjadi pada suatu sistem perekonomian, terutama lapangan usaha yang sangat dominan akan dapat memberikan dampak ke berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Demikian halnya ketika terjadi perbaikan kinerja ekonomi pada kegiatan pertambangan batu bara, perekonomian Kabupaten Berau secara keseluruhan juga turut meningkat. Seperti pada tahun 2023, nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi 31.570,05 miliar rupiah, sejalan dengan PDRB tanpa batu bara yang juga menunjukkan adanya peningkatan menjadi sebesar 14.590,13 miliar rupiah.

31.570,05 29.940,84 28.802,65 28.275,57 27.337,09 14.590,13 13.914,22 13.274,59 13.166,06 12.968,35 2019 2023 2021 □ TOTAL PDRB ■ PDRB TANPA BATU BARA

Gambar 6 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah), 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

Berbagai peristiwa ekonomi turut menjadi faktor penyebab perbaikan kinerja ekonomi di Kabupaten Berau pada tahun 2023. Seperti volume batu bara yang diangkut dan tercatat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Redeb yang mengalami kenaikan dari 36.629.418 MT pada tahun 2022 menjadi 42.094.303 MT pada tahun 2023. Selain itu produksi kelapa sawit di Kabupaten Berau pada tahun 2023 mengalami kenaikan

dari 2.514.017,29 ton pada tahun 2022 menjadi 2.549.093,69 ton pada tahun 2023. Hal tersebut juga menyebabkan produksi CPO mengalami kenaikan. Tercatat juga bahwa bahwa produksi CPO Kabupaten Berau mengalami kenaikan dari 556.416,77 ton pada tahun 2022 menjadi 568.285,15 ton pada tahun 2023. Sementara itu pada komoditas kernel justru mengalami penurunan dari 101.340,30 ton pada tahun 2022 menjadi 97.851,01 ton pada tahun 2023.

Tabel 2.2 Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,03	-3,51	1,99	2,92	2,18
В	Pertambangan dan Penggalian	6,64	-4,48	7,04	3,31	5,74
C	Industri Pengolahan	4,42	-0,32	-3,09	3,63	4,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,80	6,33	0,69	3,34	8,38
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,73	6,02	4,13	5,75	5,51
F	Konstruksi	9,51	-9,17	0,75	7,34	9,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,02	1,58	2,40	6,00	5,34
Н	Transportasi dan Pergudangan	2,46	-3,58	5,16	6,10	6,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,43	-3,63	1,48	7,72	5,63
J	Informasi dan Komunikasi	6,22	7,24	6,44	6,31	5,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	0,63	0,27	8,53	10,23
L	Real Estate	1,96	1,37	1,94	2,85	1,29
M,N	Jasa Perusahaan	2,87	-5,65	6,01	5,17	6,14
О	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	-5,45	0,74	6,26	9,41
P	Jasa Pendidikan	3,53	4,88	4,54	4,77	4,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,17	19,41	21,14	4,73	4,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,26	-2,04	1,94	6,84	5,95
	Kabupaten Berau	5,63	-3,32	5,36	3,95	5,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

PDRB per kapita digunakan untuk melihat tingkat pemerataan karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk di suatu daerah, rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar

^{*}Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

PDRB per kapita tersebut. Namun sesungguhnya, PDRB per kapita ini tidak serta menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki peran produktif dalam menciptakan nilai tambah. PDRB per kapita ini hanya memberikan gambaran secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan apakah penduduk tersebut benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, setidaknya indikator ini dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Artinya, semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka akan semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Berau pada tahun 2023 sebesar 198,53 juta rupiah per kapita. Angka ini berarti bahwa secara ekonomi setiap penduduk di Kabupaten Berau, rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar 198,53 juta rupiah selama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami penurunan mencapai 37,69 persen dari sebesar 236,23 juta rupiah pada tahun 2022. Penurunan yang tinggi disebabkan karena penurunan nilai total PDRB yang sebesar 14,76 persen, masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk yang hanya sebesar 2,33 persen. Sedangkan PDRB per kapita terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 143,67 juta rupiah, sejalan dengan penurunan PDRB totalnya akibat gejolak perekonomian selama masa awal pandemi COVID-19.

Namun yang perlu ditekankan dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran kasar terkait pemerataan output perekonomian. Faktanya adalah tidak semua penduduk ikut terlibat aktif dalam penciptaan nilai tambah pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian karena tidak semua penduduk terserap sebagai tenaga kerja pada kegiatan lapangan usaha tersebut. Penciptaan nilai tambah yang besar pada lapangan usaha ini lebih disebabkan karena kegiatan ekonomi yang berbasis sistem perekonomian padat modal dengan teknologi modern.

Tabel 2.3 PDRB Per Kapita Kabupaten Berau, 2019-2023

	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)						
	Keterangan	2019	2020	2021	2022*	2023**	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
-	ADHB	39.104,69	35.450,85	43.036,48	60.158,16	51.280,02	
-	ADHK	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,84	31.570,05	
	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)						
-	ADHB	173,83	143,67	171,49	236,23	198,53	
-	ADHK	125,69	110,79	114,77	117,57	122,23	

- Pertumbuha n PDRB per Kapita ADHK 2010	6,36	-11,86	3,60	2,44	3,96
Jumlah Penduduk (ribu orang)	224.956	246.757	250.951	254.663	258.293
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	-0,69	9,69	1,70	1,48	1,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau

2.1.1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

perubahan regulasi yang Dengan berpijak pada ada serta mempertimbangkan kesiapan regulasi teknis dalam proses pelaksanaannya, dilakukan beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut:

- Optimalisasi Potensi PAD: Melakukan identifikasi potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal, serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber PAD yang sudah ada.
- Peningkatan Efektivitas Penagihan: Memperkuat sistem penagihan pajak dan retribusi daerah, serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak/wajib retribusi yang menunggak.
- **Peningkatan Pelayanan:** Menyederhanakan prosedur perizinan dan pelayanan pajak, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak/wajib retribusi.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi perpajakan dan retribusi, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

^{*}Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola aset daerah atau mengembangkan potensi bisnis daerah.
- 6 **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendapatan Daerah

- Rendahnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak dan retribusi.
- Kelemahan sistem administrasi: Sistem administrasi perpajakan dan retribusi yang belum optimal seringkali menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan daerah.
- Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah.

Tabel 2.4. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
REKENING		PPAS 2024	PERUBAHAN PPAS	TAMBAH KURANG	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.176.000.000.000	6.099.983.827.838	2.923.983.827.838	
4.1	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	253.027.789.845	303.864.396.033	50.836.606.188	
4.1.01	a. Pajak Daerah	98.558.789.845	93.558.789.845	(5.000.000.000)	
4.1.02	b. Retribusi Daerah	12.795.031.650	110.642.378.350	97.847.346.700	
4.1.03	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.660.000.000	19.600.000.000	1.940.000.000	
4.1.04	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	124.013.968.350	80.063.227.838	(43.950.740.512)	
4.2	2. Pendapatan Transfer	2.915.917.210.155	5.766.414.283.269	2.850.497.073.114	
4.2.01	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.516.567.825.000	4.933.641.493.269	2.417.073.668.269	
4.2.01.01	1) Dana Perimbangan	2.516.567.825.000	4.827.052.231.269	2.310.484.406.269	
4.2.01.01.01	a) Dana Transfer Umum	2.516.567.825.000	4.607.983.940.269	2.091.416.115.269	
4.2.01.01.01.01	(1) Dana Bagi Hasil (DBH); dan	1.949.955.232.000	4.018.936.066.269	2.068.980.834.269	
4.2.01.01.02.01	(2) Dana Alokasi Umum (DAU)	566.612.593.000	589.047.874.000	22.435.281.000	
4.2.01.01.03	b) Dana Transfer Khusus (DAK)	-	219.068.291.000	219.068.291.000	
4.2.01.01.03.01	(1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik); dan	-	82.281.122.000	82.281.122.000	
4.2.01.01.04.01	(2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	-	136.787.169.000	136.787.169.000	
4.2.01.02	2) Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0	

4.2.01.03	3) Dana Otonomi Khusus (DOK)	-	-	0
4.2.01.04	4) Dana Keistimewaan	-	-	0
4.2.01.05	5) Dana Desa	-	92.616.709.000	92.616.709.000
4.2.01.06	6) Insentif Fiskal	-	13.972.553.000	13.972.553.000
4.2.02	b. Transfer Antar-Daerah	399.349.385.155	832.772.790.000	433.423.404.845
4.2.02.01	1) Pendapatan Bagi Hasil; dan	399.349.385.155	476.812.790.000	77.463.404.845
4.2.02.02	2) Bantuan Keuangan	-	355.960.000.000	355.960.000.000
4.3	O. I. day Day Jamesters	7.055.000.000	20 505 440 526	22 (50 440 52)
4.3	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.055.000.000	29.705.148.536	22.650.148.536
4.3.01	<u> </u>	7.055.000.000	20.074.148.536	20.074.148.536
	Daerah yang Sah	7.055.000.000 - -		
4.3.01	Daerah yang Sah a. Hibah;	7.055.000.000 - - 7.055.000.000		20.074.148.536
4.3.01 4.3.02	Daerah yang Sah a. Hibah; b. Dana Darurat; c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	-	20.074.148.536	20.074.148.536

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dengan membandingkan antara target pada RKPD dan realisasi anggaran pembangunan akan terlihat pergerakan anggaran keuangan Kabupaten Berau. Pergerakan anggaran pembangunan tersebut dapat digunakan untuk asumsi pendanaan pada periode selanjutnya, khususnya pada perubahan tahun 2024.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun sisa tahun 2024. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung SKPD pada perubahan 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui:

1. Belanja daerah pada sisa Tahun 2024 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Berau yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- 2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 3. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi SKPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Berau.
- 4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Berau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Berau, termasuk investasi bidang pendidikan, pariwisata, perikanan, hotel & restoran.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja barang dan jasa yang dialokasikan meliputi belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, belanja pengiriman surat dinas, belanja honor operasional Satker, belanja keperluan atase pertahanan luar negeri, dan belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan belanja jasa akan dialokasikan untuk belanja langganan daya dan Jasa, belanja jasa konsultan, belanja sewa, belanja jasa profesi, belanja jasa kepada Badan Layanan Umum (BLU), dan belanja jasa lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan belanja daerah pada Semester I 2024, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah pada periode perubahan 2024 akan diarahkan pada:

- 1. Akselerasi transformasi ekonomi melalui penguatan fungsi alokasi pada bidang prioritas yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 (program prioritas Kepala Daerah);
- 2. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- 3. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagaimana tercantum pada pasal 171 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Penyelesaian proyek/kegiatan yang sedang berjalan dan ditargetkan dapat selesai pada tahun 2023;
- 6. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- 7. Memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah di akhir tahun periode masa jabatan Kepala Daerah sebelum dilakukannya pilkada serentak 2024;
- 8. Penguatan fungsi stabilisasi untuk menjada daya beli masyarakat;
- 9. Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Tema Pembangunan Berau Tahun 2024;
- 10. Mendukung program/kegiatan terkait pembangunan IKN dan persiapan pemilu dan pilkada serentak.

Dalam perhitungan kerangka pendanaan, Pemerintah melakukan perhitungan rencana belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya seperti disajikan dalam tabel dibawah ini. Komponen belanja wajib dan mengkat ini terdiri dari belanja operasi yang mencakup belanja pegawai dan lainnya serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sebelumnya menjadi bagian dari Belanja Langsung. Serta pengangkatan CPNSD maupun PPPK.
- 2. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.
- Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- 4. Pembiayaan persiapan pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 dimana sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Pemilu bahwa pendalaan pemilu dan pilkada serentak dialokasikan dari dana hibah dengan proporsi pada tahun 2023 sebesar 40%.

Untuk Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan, semula Rp. 3.174.000.000.000 bertambah sebesar Rp. 3.800.045.172.162 sehingga menjadi Rp. 6.974.045.172.162 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

,		Rencana Perubahan	
URAIAN	Penetapan 2024	2024	Bertambah/Berkurang
BELANJA	3.174.000.000.000	6.991.195.000.000	3.817.195.000.000
a. Belanja Operasi			
1). Belanja Pegawai			
2). Belanja Barang & Jasa			
3). Belanja Bunga			
4). Belanja Subsidi			
5). Belanja Hibah			
6). Belanja Bantuan Sosial			
b. Belanja Modal			
1). Belanja Modal Tanah			
2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
4). Aset Tetap Lainnya			
5). Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
7). Belanja Modal Aset Lainnya			
c. Belanja Tak Terduga			
d. Belanja Transfer			
1) Belanja Bagi Hasil			
2). Belanja Bantuan			
Keuangan			

Sedangkan perubahan rencana belanja per Urusan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Perubahan rencana belanja per SKPD

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.01.1	Dinas Pendidikan	409.966.471.261	803.783.275.758	393.816.804.497
1.02.1	Dinas Kesehatan	248.710.196.730	361.978.169.840	113.267.973.110
1.02.1	RSUD Dr. Abdul Rivai	179.609.186.773	272.153.520.110	92.544.333.337
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.169.593.321.023	3.701.533.227.843	2.531.939.906.820
1.04.1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	15.013.904.328	57.749.524.429	42.735.620.101
1.05.1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	13.781.866.774	22.160.653.374	8.378.786.600

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.05.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.294.444.076	31.832.451.714	18.538.007.638
1.6.1	Dinas Sosial	13.683.619.501	21.520.167.288	7.836.547.787
2.07.3	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	10.760.397.851	18.130.992.051	7.370.594.200
2.09.2	Dinas Pangan	11.121.599.893	14.799.536.893	3.677.937.000
2.10.1	Dinas Pertanahan	16.255.157.906	28.070.930.406	11.815.772.500
2.11.1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	38.439.805.397	61.242.345.403	22.802.540.006
2.12.1	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	9.572.762.390	13.335.928.477	3.763.166.087
2.13.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	12.716.667.785	18.413.837.996	5.697.170.211
2.14.2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.010.536.813	24.001.934.245	9.991.397.432
2.15.0	Dinas Perhubungan	81.444.795.901	147.463.044.793	66.018.248.892
2.16.2	Dinas Komunikasi Dan Informatika	20.165.777.411	35.184.945.905	15.019.168.494
2.17.3	Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan	28.122.839.038	47.861.194.179	19.738.355.141
2.18.0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu	8.270.076.979	16.072.946.026	7.802.869.047
2.19.0	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	18.264.551.176	32.957.170.051	14.692.618.875
2.22.3	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	19.963.563.910	56.596.236.263	36.632.672.353
2.23.2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.191.340.668	18.886.702.992	6.695.362.324
3.2.5	Dinas Perikanan	12.666.273.387	22.520.811.133	9.854.537.746
3.3.1	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	26.213.084.414	39.999.808.914	13.786.724.500
3.3.2	Dinas Perkebunan	12.885.489.176	18.861.733.169	5.976.243.993
4.01.1	Sekretariat Daerah	111.397.198.602	163.421.186.000	52.023.987.398
4.02.0	Sekretariat DPRD	74.840.994.389	105.814.696.089	30.973.701.700
5.01.5	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	19.322.383.063	25.238.689.069	5.916.306.006
5.02.0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	343.631.232.234	519.902.496.494	176.271.264.260
5.02.0	Badan Pendapatan Daerah	16.579.698.870	27.625.227.670	11.045.528.800

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.03.5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.791.614.016	25.371.262.016	7.579.648.000
6.01.0	Inspektorat	16.206.729.226	22.667.758.168	6.461.028.942
7.01.1	Kecamatan Tanjung Redeb	23.453.785.789	35.392.216.388	11.938.430.599
7.01.2	Kecamatan Gunung Tabur	8.562.908.900	11.936.783.730	3.373.874.830
7.01.3	Kecamatan Sambaliung	8.322.494.526	11.727.589.125	3.405.094.599
7.01.4	Kecamatan Teluk Bayur	11.160.538.751	15.612.373.550	4.451.834.799
7.01.5	Kecamatan Segah	4.996.565.350	7.216.511.150	2.219.945.800
7.01.6	Kecamatan Kelay	4.294.746.864	6.520.090.063	2.225.343.199
7.01.7	Kecamatan Pulau Derawan	3.685.562.726	6.031.022.725	2.345.459.999
7.01.8	Kecamatan Talisayan	5.574.062.975	7.756.941.675	2.182.878.700
7.01.9	Kecamatan Biduk - Biduk	4.417.929.012	7.170.392.486	2.752.463.474
7.01.1	Kecamatan Maratua	6.143.389.064	9.006.264.493	2.862.875.429
7.01.1	Kecamatan Tabalar	4.716.950.952	6.778.250.600	2.061.299.648
7.01.1	Kecamatan Batu Putih	3.762.314.688	6.708.785.463	2.946.470.775
7.01.1	Kecamatan Biatan	3.991.009.508	5.477.252.487	1.486.242.979
8.01.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.430.159.934	76.708.121.307	12.277.961.373
	JUMLAH	3.174.000.000.000	6.991.195.000.000	3.817.195.000.000

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Struktur Pembiayaan Daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah bersumber dari SiLPA Tahun 2023. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan

Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Perubahan Pembiayaan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Berau Tahun 2024

URAIAN	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/BERK URANG
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan pembiayaan	449.290.121.195	893.211.172.162	443.921.050.967
Sisa Lebih Perhitungan	449.290.121.195	893.211.172.162	443.921.050.967
Anggaran Tahun Anggaran			
sebelumnya (SILPA)			
Dongairan Dana Cadangan	0	0	0
Pelicali ali Dalia Caualigali			
Hasil penjualan kekayaan	0	0	0
Daerah yang dipisahkan			
Penerimaan pinjaman	0	0	0
daerah			
Penerimaan kembali	0	0	0
pemberian pinjaman			
Penerimaan piutang	0	0	0
daerah			
Jumlah penerimaan	449.290.121.195	893.211.172.162	443.921.050.967
pembiayaan			
	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Pembentukan dana	0	0	0
cadangan			
Penyertaan modal	2.000.000.000	2.000.000.000	0
(Investasi) daerah			
Domhayaran nolkok utang	0	0	0
rembayaran pokok utang			
Pemberian niniaman	0	0	0
Jumlah pengeluaran	2.000.000.000	2.000.000.000	0
pembiayaan			
Pembiayaan Netto	447.290.121.195	891.211.172.162	443.921.050.967
	PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan	PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan pinjaman Penerimaan pintang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pemberian pinjaman daerah Pemberian pinjaman Penbayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan	PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaan Pembayaan Pembayaan Pembayaan Pembayaan Pembayaran pokok utang Pembayaan Pembayaan Pembayaan Pembayaan Pemberian pinjaman Pembayaan

Perubahan Kebijakan Umum Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang relatif sangat mendesak dan lebih merupakan pemenuhan kewajiban yang perlu direncanakan dalam Perubahan APBD Kabupaten Berau termasuk didalamnya penyelesaian pembayaran hutang belanja tahun anggaran 2023, penganggaran kembali program dan kegiatan yang bersumber dari dana DBH-DR, penganggaran kembali sisa belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023, penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada APBD tahun 2023 serta pemenuhan alokasi belanja pegawai baik anggota DPRD maupun ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan alokasi anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 893.211.172.162.

Khusus mengenai SiLPA sebagaimana dimaksud di atas, pada dasarnya adalah hasil pelampauan target pendapatan dan hasil efisiensi belanja dalam bentuk program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang telah disajikan dalam LKPD tahun anggaran 2023. Sementara itu, menyangkut alokasi pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di tetapkan sebesar Rp.2.000.000.000 hal ini sebagai amanat peraturan Daerah nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah No.5 tahun 1998 tentang pembentukan perusahaan daerah Bhakti praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau, dimana anggaran tersebut sebagai modal disetor kepada perusda Bhakti Praja.

BAB III PENUTUP

Sebagai pedoman Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 yang diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, maka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 mengintegrasikan antara program dan kegiatan serta penganggaran, pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Berau yang berlangsung pada tahun 2024 ini diharapkan mampu:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Berau sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah.
- 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 4. Menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran hingga kesenjangan social antar penduduk maupun maupun antar wilayah.
- 5. Mewujudkan sumber daya masyarakat Kabupaten Berau yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pondasi utama dalam menjalani kehidupan.

Tanjung Redeb, 9 Agustus 2024

TUA DPRD ADRI PANI, SE

SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

